

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN YANG BERMUTU DAN TANPA DISKRIMINASI

(Studi Kasus pada Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah)



Tat 06/05
Was
P

Disusun Oleh :

WIWIK BUDI WASITO
030015087



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARGA NEGARA
UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN YANG BERMUTU DAN TANPA
DISKRIMINASI**

**(Studi Kasus pada Pelaksanaan Wajib Belajar pendidikan dasar
dan Pendidikan menengah)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,


Sukardi, S.H., M.H.
NIP. 131 855 885

Penyusun,


Wiwik Budi Wasito
NIM. 0300 150 87

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2005**



IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Bertolak dari pembahasan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan apa yang tertera dalam peraturan-peraturan di atas, pemerintah berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang tidak hanya gratis tetapi juga harus bermutu dan tanpa diskriminasi. Pendidikan yang bermutu sebagaimana terklasifikasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, wajib dipenuhi oleh pemerintah. Sedangkan penghapusan diskriminasi pendidikan dapat ditempuh oleh pemerintah melalui perwujudan pendidikan gratis bagi setiap warga negara tanpa terkecuali sebagaimana telah diamanahkan dalam konstitusi, baik untuk sekolah negeri maupun swasta di tanah air.

Namun pada kenyataannya, pemerintah gagal untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan tanpa diskriminasi, terbukti dengan masih adanya beban pembiayaan pendidikan yang dilimpahkan kepada masyarakat, yang mana dirasa semakin lama semakin memberatkan seiring dengan perkembangan zaman. Selain itu, masih ada masyarakat yang tidak (belum) tahu mengenai hak-haknya untuk memperoleh pendidikan gratis, bermutu dan tanpa diskriminasi. Sedangkan bagi mereka yang tahu, mengaku bahwa

mereka tidak mengetahui harus kemana – bahkan sebagian cenderung apatis dan sebagian lagi tidak peduli – untuk menuntut hak-haknya tersebut.

- b. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dinilai masih gagal untuk mewujudkan pelaksanaan pendidikan bermutu dan tanpa diskriminasi. Belum lagi, permasalahan ukuran/batasan pembiayaan pendidikan dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang tidak jelas, yang akhirnya masih memberi peluang bagi pihak sekolah untuk memungut biaya secara bebas bahkan sepihak.

2. Saran/aksi.

- a. Untuk meminimalisir ketidaktahuan rakyat akan pengaturan dan perlindungan hak-haknya, sekaligus sebagai upaya perlindungan hukum preventif bagi rakyat, Pemerintah dalam setiap peraturan perundang-undangan yang dibuatnya, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak secara keseluruhan, dalam hal ini, pendidikan, Pemerintah berkewajiban menyusun mekanisme sosialisasi perundang-undangan itu secara jelas agar setiap orang benar-benar mengetahuinya. Masyarakat awam tidak akan tahu ketika, agar setiap orang mengetahuinya, perundang-undangan tersebut hanya ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia saja.
- b. perlunya diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam bidang pendidikan, perihal Hak Gugat Warga Negara sebagai satu

terobosan hukum berkaitan dengan upaya perlindungan hukum represif bagi rakyat. Lebih khusus lagi, perlu diciptakannya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai aturan beracara mengenai hak gugat warga negara.

Untuk mendukung hak gugat warga negara, perlu pula diatur mengenai kejelasan pertanggungjawaban pemerintah dalam hal pengawasan di tiap-tiap jenjang dan jenis pendidikan, supaya di masa yang akan datang, pertanggungjawaban institusional terhadap pengawasan penyelenggaraan pendidikan menjadi jelas.

Dengan adanya pemikiran alternatif ini, penulis berharap nantinya pemikiran mengenai perkembangan pendidikan ini akan selalu berkembang dan tidak berhenti hanya disini saja. Semoga pemikiran ini dapat menjadi rangsangan untuk terus dikembangkannya khasanah keilmuan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan pendidikan. Penulis melihat dengan mata dan kepala sendiri bahwa di “luar sana” masih banyak lagi permasalahan hukum khususnya mengenai pendidikan yang masih perlu dicarikan jalan keluar permasalahannya. Dengan didasari oleh sebuah kesadaran bahwa ilmu pengetahuan harus dikembangkan bagi kemaslahatan segenap umat manusia, penulis berharap bahwa apa yang telah tersaji dalam penulisan ini dapat membawa manfaat dan menjadi inspirasi positif bagi pembaca sekalian.